

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2000-2011

Analysis regional Financial Performance Toward Economic Development
Of Jember District In 2000 - 2011

TESIS

Oleh:

HANDHOFI TISNA WARDHANA

NIM 070820201002

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

JEMBER 2013

LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL : 25 APRIL 2013

Dosen Pembimbing Utama :

Prof. Dr. H. M. Saleh, M.Sc
NIP 195608311984031002

Dosen Pembimbing Anggota :

Dr. Rafael Purতোমো Somadji, M.Si
NIP 195810241988031001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana
Universitas Jember

Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si
NIP 197106102001122002

Ringkasan

Kriteria keberhasilan pembangunan daerah dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara sektoral maupun perkapita yang menunjukkan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan dan balas jasa terhadap pemilik faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Pembangunan nasional berorientasi pada peningkatan pembangunan daerah melalui otonomi daerah, Indonesia aktif sejak tahun 2001.

Kabupaten Jember secara geografis berpotensi pada sektor pertanian karena banyaknya daerah aliran sungai dan berpotensi pada sektor pariwisata karena di kelilingi pegunungan dan berbatasan dengan lautan. Total jumlah penduduk 2.329.929 jiwa, 61,37% dari total jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian akan tetapi tingkat pendidikan penduduk masih sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember cukup tinggi 6,04% terjadi di sektor perdagangan, rumah makan dan hotel, sedangkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian lebih rendah yaitu 3,02% per tahun.

Selama masa otonomi daerah, hasil analisis menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Jember terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yang ditunjukkan dari rasio kemandirian fiskal yang rendah kurang dari 25% yaitu berkisar antara 5,16% - 10,95%. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) yang diterimapun juga sangat sedikit dibandingkan dengan total pendapatan daerah (TPD) yang berkisar antara 5% - 11,57%. Rasio sumbangan pemerintah pusat terhadap TPD sangat tinggi di tahun 2011 masih sebesar 77,45%. Kebutuhan fiskal Kabupaten Jember semakin kecil, IPP tahun 2001 sebesar 442,48 dan di tahun 2011 menurun menjadi 215,92.

Besarnya kapasitas fiskal yang terus meningkat tidak diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam kenyataannya PAD yang mampu disumbangkan pada total pendapatan daerah hanya sebesar 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi setiap daerah yang dimiliki Kabupaten Jember belum tergarap dengan baik, sehingga kemampuan daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran daerahnya masih sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi

berdasarkan nilai rupiah di Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan hingga mencapai 9,10% di tahun 2011.

Analisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, uji regresi di peroleh hasil $Y = 170.011.015 + 0,621 X_1$. Sedangkan dari uji asumsi klasik, asumsi normalitas terpenuhi; tidak terdapat multikolinearitas; tidak ada autokorelasi positif maupun negative; dan tidak mengalami heterokedastisitas. Analisis statistik uji-F test menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, sedangkan hasil koefisien determinasi Kabupaten Jember 0,649 menunjukkan bahwa pengaruh Kapasitas fiskal Kabupaten Jember sebesar 64,90% dan sumbangan pengaruh diluar variabel penelitian ini hanya sebesar 35,10%.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN.....	vi
ABSRTRAK.....	viii
DAFTAR ISI... ..	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi	8
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.3 Konsep Otonomi Daerah.....	16
2.1.4 Keuangan Daerah.....	18
2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	21
2.1.6 Sumber-sumber Penerimaan Daerah.....	24
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	26
2.1.8 Pengertian Kinerja	30
2.1.9 Pengukuran Kinerja	30
2.1.10 Indikator Kinerja.....	31
2.1.11 Analisis Kinerja Keuangan pada APBD	33
2.1.12 Desentralisasi Fiskal	40
2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	44
2.3 Kerangka Konseptual.....	47
2.4 Hipotesis	48
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	50
3.1 Rencana Penelitian	50
3.1.1 Jenis Penelitian	50
3.1.2 Unit Analisis	50
3.1.3 Populasi dan Sampel.....	50

3.1.4 Daerah Penelitian	51
3.2 Jenis dan Sumber Data	51
3.3 Metode Analisis Data	52
3.3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	52
3.3.2 Pertumbuhan Ekonomi	56
3.3.3 Analisis Regresi	56
3.4 Definisi Varibel Operasional.....	61
BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember.....	62
4.1.1 Keadaan Geografis Kabupaten Jember	62
4.1.2 Pemerintahan Kabupaten Jember.....	65
4.1.3 Penduduk.	66
4.1.3.1 Pekerjaan Penduduk	67
4.1.3.2 Pendidikan Penduduk	68
4.1.4 Perekonomian.	68
4.2 Hasil Analisis	70
4.2.1 Desentralisasi Fiskal	70
4.2.1.1 Rasio Kemandirian Fiskal	70
4.2.1.2 Rasio Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pajak (BHPBP) terhadap Total Pendapatan Daerah /TPD.	73
4.2.1.3 Rasio Sumbangan Pemerintah Pusat Terhadap Total Pendapatan Daerah Jember.....	75
4.2.2.4 Kebutuhan Fiskal.....	76
4.2.2.5 Kapasitas Fiskal.....	78
4.2.2 Perkembangan Ekonomi.	80
4.2.3 Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Perkembangan Ekonomi	82
4.3 Pembahasan	90
4.3.1 Desentralisasi Fiskal	90
4.3.2 Perkembangan Ekonomi.....	94
4.3.3 Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Perkembangan Ekonomi	96
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Implikasi Kebijakan.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan suatu usaha, untuk meningkatkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang berarti tingkat pertambahan Gross Domestic Product (GDP) melebihi tingkat pertambahan penduduk pada suatu tahun tertentu. Melakukan perombakan dan modernisasi dalam struktur perekonomian yang pada umumnya masih bercorak tradisional (dominasi sektor pertanian).

Salah satu indikasi pembangunan ekonomi adalah peningkatan taraf hidup suatu bangsa yang ditunjukkan dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang direalisasikan dalam pembangunan daerah, yang terutama ditekankan pada upaya peningkatan daya guna dari hasil guna pembangunan sektoral di daerah agar benar-benar disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah.

Kebutuhan utama pada pembangunan daerah yang perlu diperhatikan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing daerah tentunya sangat bervariasi. Karena itu bila prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut maka sumber daya kurang dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, yang

selanjutnya mengakibatkan meningkatnya kesenjangan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Menurut Iwan (1994: 97) kriteria utama keberhasilan pembangunan daerah adalah dalam bentuk Product Domestic Regional Bruto (PDRB) secara sektoral maupun perkapita. Oleh karena itu PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa terhadap pemilik faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah tersebut.

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang sedang tumbuh dan berkembang, besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi, Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember Tahun 2000 s/d 2011

No	Tahun	Jawa Timur			Kabupaten Jember		
		PDRB (x 1T Rp)	Percapita (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB (X1M Rp)	Percapita (Rp)	Pertmbuhan Ekonomi (%)
1	2000		7,226.46		6,673,000.65	2,187,657	
2	2001	212,223.4	7,436.75	2.40	6,899,000.33	2,201,261	3.39
3	2002	218,224.5	7,818.68	2.83	7,171,000.26	2,214,990	3.94
4	2003	228,884.4	8,302.75	4.88	7,457,000.96	2,231,793	3.99
5	2004	242,228.8	9,301.34	5.83	7,803,000.93	2,249,213	4.64
6	2005	256,374.7	11,002.10	5.84	8,195,000.59	2,264,286	5.02
7	2006	271,249.3	13,009.17	5.80	8,705,000.99	2,141,553	6.22
8	2007	288,404.3	14,135.55	6.32	9,138,000.18	2,138,548	4.97
9	2008	305,538.6	14,975.35	5.94	9,783,828.13	2,043,614	7.07
10	2009	320,861.1	15,726.35	5.01	10,326,735.61	2,153,604	5.55
11	2010	342,280.7	16,776.19	6.68	10,950,020.25	2,329,929	6.04
12	2011	366,984.3	17,986.99	7.22	11,947,000.92	2,374,859	9.10
	Jml	-	-	58.75	-	-	59.94
	Rata-2	-	-	5.34	-	-	5.45

Sumber data : BPS Jawa Timur dan Kabupaten Jember 2012

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa selama 11 tahun perekonomian Jawa timur tumbuh rata-rata 5,34% pertahun dan Kabupaten Jember tumbuh rata-rata 5,45% pertahun.

Pendekatan yang bersifat regional mempunyai strategi yang berbeda, pendekatan ini biasanya didahului dengan melihat sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang dikembangkan dan setelah terinventarisir baru melihat daya dukungnya. Daya dukung tersebut berupa tingkat ketersediaan sumber daya yang masing-masing saling mendukung, sehingga dilakukan penelitian tentang daya dukung tersebut. Prinsip pertumbuhan ekonomi tidak terjadi disembarang tempat melainkan tumbuh di kutub-kutub pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Perbedaan potensi yang dimiliki daerah mengakibatkan perbedaan pertumbuhan. Untuk itu pemerintah daerah perlu mempertimbangkan adanya kemungkinan sektor-sektor mana saja yang mungkin mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya. Sehingga perlu adanya penentuan prioritas pembangunan pada setiap daerah guna meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pembangunan nasional berorientasi pada peningkatan pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan dalam GBHN (1993: 2002) bahwa pembangunan daerah senantiasa ditingkatkan dan dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang serta diarahkan supaya pembangunan yang berlangsung di daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah agar laju pertumbuhan antar daerah semakin serasi dan seimbang, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah berlaku efektif pada tahun 2001. Daerah harus dapat

mengembangkan potensi ekonomi daerah agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan mendorong kemandirian daerah agar mampu bersaing di era globalisasi.

Penyerahan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah disertai dengan kewenangan pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber penerimaan sendiri untuk membiayai pengeluaran (Simanjuntak dalam Prosoding, 1999: 20). Penerimaan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah, sedangkan pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan daerah ditunjukkan dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki masing-masing daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui dan mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: rasio kemandirian untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah; rasio efisiensi untuk mengukur efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah dan rasio keserasian.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan otonomi daerah masih tidak sesuai dengan konsep. Hal ini dapat terlihat dari lemahnya pengembangan kebijakan

kelembagaan ditinjau dari minimnya prakarsa daerah terhadap program otoda. Dalam bidang keuangan untuk pelaksanaan jasa publik yang seharusnya dibiayai pemerintah daerah dengan PAD, ternyata masih mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Salah satu Pemerintah Daerah yang mengandalkan PAD untuk pembangunan daerahnya adalah Kabupaten Jember dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan pada tahun 2000 sebesar 5,16 % dan pada tahun 2011 menjadi 10,78 %. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Realisasi Total Pendapatan Kabupaten Jember
Tahun 2000-2011 (dalam Rupiah)

No. Urut	URAIAN	2000	2011	(%)
I	PENDAPATAN DAERAH			
I.1	Pendapatan Asli Daerah	25,589,413,200.00	182,797,340,158.79	614.35
I.1.1	Pajak Daerah	8,326,356,050.00	40,708,973,394.50	388.92
I.1.2	Retribusi Daerah	15,041,289,750.00	20,816,368,771.00	38.39
I.1.3	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,893,258,550.00	15,290,566,018.82	707.63
I.1.4	Lain-lain PAD Daerah yang Sah	328,508,850.00	105,981,431,974.47	32161.36
I.2	Dana Perimbangan	384,376,543,300.00	1,250,834,951,524.00	225.42
I.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	14,875,668,100.00	92,589,279,524.00	522.42
I.2.2	Dana Alokasi Umum	255,174,029,850.00	955,007,373,000.00	274.26
I.2.3	Dana Alokasi Khusus	102,001,844,500.00	99,597,200,000.00	-2.36
I.2.4	Dana Penyesuaian Infrastruktur	12,325,000,850.00	103,641,099,000.00	740.90
I.2.5	Dana Kontingensi	-	0	
I.3	Lain-2 Pdptn Daerah yg Sah	85,871,857,750.00	258,531,190,807.00	201.07
I.3.1	Hibah	30,587,300,150.00	88,738,658,201.00	190.12
I.3.2	Dana Darurat	40,409,557,600.00	0	
I.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	14,875,000,000.00	134,476,349,611.00	804.04
I.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	38,509,054,500.00	
I.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	162,186,703.00	
	Jumlah Pendapatan	495,837,814,250.00	1,695,518,540,697.79	241.95

Sumber: BPS Jember 2012 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 pendapatan asli daerah selama 11 tahun mengalami peningkatan sebesar 614,35% pertahun dari tahun 2000 ke tahun 2011. Hal ini

merupakan bukti bahwa Kabupaten Jember merupakan daerah yang memiliki potensi relatif tinggi untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Kabupaten Jember merupakan pusat pertumbuhan secara sosial-ekonomi menjadi suatu kota besar dalam suatu wilayah yang luas dan merupakan pusat pelayanan jasa-jasa terutama jasa pemerintahan (government services), secara ekonomi-demografi menjadi pusat kegiatan ekonomi atau aglomerasi dan pusat konsentrasi penduduk yang mempunyai potensi pasar yang kuat bagi hasil-hasil produksi terutama bahan mentah dari sektor pertanian. Peran PAD yang masih sangat kecil berpengaruh terhadap pendapatan total Kabupaten Jember. Pendapatan total yang besar akan menjadi kecil dengan melihat pendapatan per kapita Kabupaten Jember. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Kabupaten Jember mencapai 2.187.657 jiwa dengan pendapatan per kapita Rp 3.050.590,00 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 2.320.844 jiwa dengan pendapatan per kapita 5.798.232,9 rupiah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut:

- a. Seberapa besar kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Jember di era otonomi?
- b. Seberapa besar perkembangan ekonomi dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember di era otonomi?

- c. Seberapa besar pengaruh kapasitas fiskal terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kemandirian Kabupaten Jember di era otonomi.
- b. Untuk mengetahui besarnya perkembangan ekonomi yang dimiliki Kabupaten Jember di era otonomi.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas fiskal terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang potensi ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Jember dan prospek pengembangannya.
- b. Menjadi bahan referensi dan kajian bagi upaya penelitian yang lebih mendalam dan komperhensif terhadap masalah pengembangan potensi ekonomi daerah khususnya daerah Kabupaten Jember.
- c. Menjadi sumbangan pemikiran bagi daerah Kabupaten Jember dan kabupaten lain pada umumnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Dalam satu negara, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan hal pokok yang harus dipenuhi. Lincolin Arsyad (1999: 46) menyebutkan ada beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan yaitu:

a. Mahzab Historismus

Mahzab Historismus melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan sejarah dengan kajian yang bersifat induktif empiris. Ada beberapa ahli yang tergabung dalam mahzab Historismus diantaranya:

1. Friedrich List

List memandang bahwa perkembangan ekonomi melalui 5 tahap primitif yaitu peternakan, pertanian, perikanan dan industri pengolahan, dan industri pengolahan serta perdagangan.

2. Bruno Hildebrand

Dalam pemikiran Bruno, perkembangan ekonomi bukan berdasarkan cara produksi maupun cara konsumsi tetapi pada cara distribusi. Bruno mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu perekonomian barter cultural, perekonomian uang dan perekonomian kredit.

3. Karl Bucher

Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi melalui 3 tahap yaitu produksi untuk sendiri (sub sistem), perekonomian kota dan perekonomian

nasional. Pendapat ini merupakan sintesa dari pendapat Friedrich List dan Bruno Hildebrand

4. Walt Whiteman Rostaw

Menurut Rostaw, proses pembangunan ekonomi dibagi dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional, pra syarat tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan konsumsi tinggi.

b. Mahzab Klasik

1. Adam Smith

Menurut Adam Smith, ada 2 aspek utama dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok barang modal) dan pertumbuhan penduduk.

2. David Ricardo

David Ricardo mengungkapkan, peran akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja artinya dapat memperlancar bekerjanya the law of diminishing return yang menurunkan tingkat hidup.

3. Teori Solow-Swan

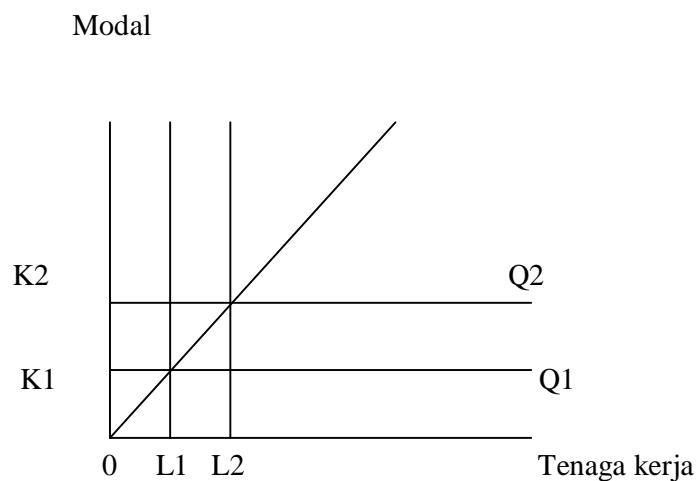
Menurut teori Neo Klasik (Solow-Swan) ini (dalam Arsyad, 1999: 61) pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana

perekonomian akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital dan kemajuan teknologi.

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (capital-output ratio) bisa berubah atau bersifat dinamis. Artinya untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan besarnya modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

c. Mahzab Keynesian

Mahzab Keynesian diwakili oleh teori pertumbuhan Harrod-Domar. Dalam teorinya, Harrod-Domar menyebutkan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh pesat dengan adanya investasi-investasi baru sebagai tambahan modal.



Gambar 2.1 Fungsi Produksi Harrod Domar

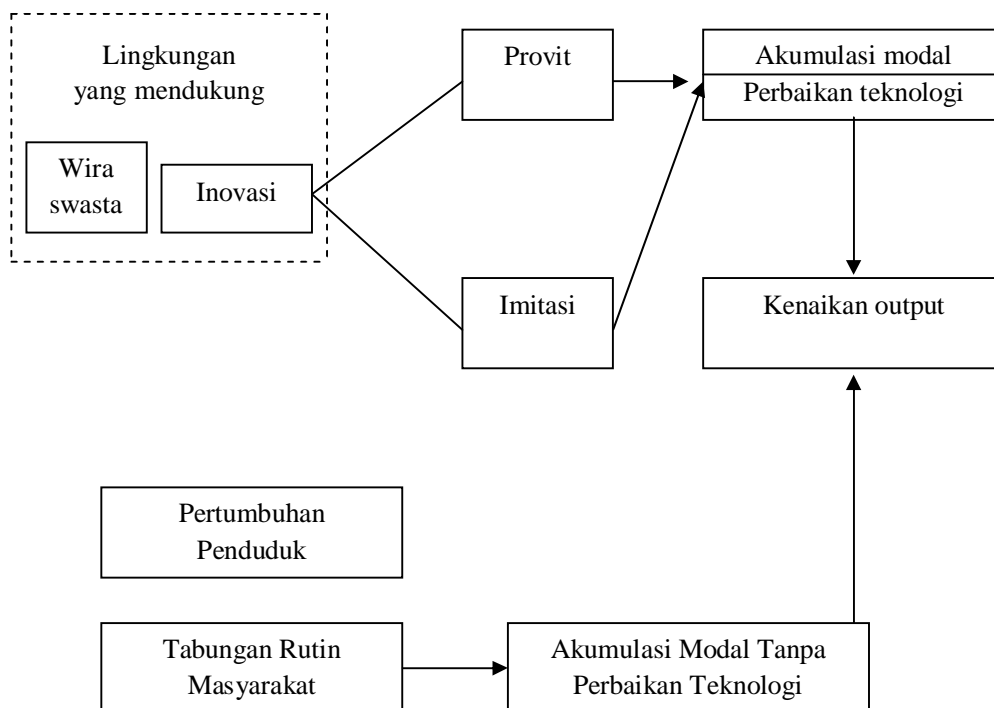
Asumsi yang digunakan :

1. Perekonomian dalam keadaan fullemployment.
2. Perekonomian terdiri dari 2 sektor.
3. Besarnya tabungan masyarakat = proporsional dengan pendapatan.
4. LOR dan ICOR tetap.

d. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh inovasi dan investor (wirausaha) dengan diperkenalkan teknologi baru. Secara sistematis pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter pada Gambar 2.2 berikut.

Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 2.2 Teori Pertumbuhan Schumpeter

e. Pendekatan Strukturalisme

Dasar pandang penulis dalam ekonomi pembangunan termasuk alur pemikiran strukturalis yang sudah terlihat dari ulasan yang disajikan sebelumnya. Proses pembangunan dilihat sebagai transisi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh transformasi yang bersifat multi-dimensional yaitu suatu transisi dari kontelasi ekonomi (kerangka susunan tertentu dalam keadaan ekonomi) yang mengalami stagnasi ke arah perimbangan-perimbangan keadaan yang sudah mengandung gerak kekuatan dinamika dalam perkembangannya. Transformasi multidimensional mencakup perubahan dan perimbangan-perimbangan keadaan yang ditahap awal (stagnasi) melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan tata susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, atau secara singkat perubahan pada struktur ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi sebagai proses transisi dan transformasi berkisar pada perubahan struktural. Perubahan struktural menyangkut perubahan-perubahan pada struktur dan komposisi produk nasional, pada kesempatan kerja yang produktif pada ketimpangan antar sektoral, antar daerah, dan antar golongan masyarakat, pada kemiskinan dan kesenjangan antara golongan berpendapatan rendah dan tinggi. Segala sesuatunya menjadi segi-segi utama pada pendekatan teoretis dalam ekonomi pembangunan dan dalam model-model tentang pembangunan.

Perubahan-perubahan pada ciri-ciri pokok dalam suatu struktur ekonomi berkaitan dengan perkembangan (kenaikan) tingkat pendapatan. Pengalaman empiris membuktikan (Simon Kuznets), dengan meningkatnya

pendapatan terjadi pergeseran-pergeseran pada komposisi produk nasional (pergeseran diantara sumbangan sektoral-primer, sekunder, tersier-terhadap produk nasional), pada kesempatan kerja produktif (dari sektor primer beralih pada sektor sekunder dan sektor tersier) dan pola perdagangan (dari komoditi primer ke barang manufaktur dan pemberian jasa). Pokok permasalahan berkisar pada daya upaya untuk mewujudkan gerak kegiatan yang menambah secara kontinyu pendapatan nasional maupun pendapatan perkapita. Hal ini sebagai pendekatan pertama yang mencerminkan peningkatan taraf hidup rata-rata dalam masyarakat.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, pertambahan jumlah infra struktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Menurut Kuznet dalam Todaro (2003: 99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada.

Kuznets dalam Pressman (2000: 77) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Dari kedua faktor ini pertumbuhan produktivitas jelas lebih penting, karena seperti yang ditunjukkan oleh Adam Smith, pertumbuhan produktivitas inilah yang menghasilkan peningkatan dalam standar kehidupan. Kuznets sangat menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara meningkatkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif (yaitu industri manufaktur).

Todaro (2003: 92) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Menurut teori Klasik, akumulasi modal serta jumlah tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Smith menyebut ada tiga unsur pokok dalam produksi suatu negara, yaitu:

- a. Sumber daya yang tersedia, yaitu tanah.
- b. Sumber daya insani, yaitu jumlah penduduk.
- c. Stok barang modal yang ada.

Menurut Schumpeter dalam Pressman (2000: 155) pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus tetapi mengalami keadaan di mana adakalanya berkembang dan pada suatu saat akan mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (entrepreneur) melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini investasi akan dilakukan, dan penambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Proses multiplier yang ditimbulkannya akan menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam kegiatan ekonomi dan perekonomian mengalami pertumbuhan yang lebih pesat (dalam teori A15 ekziani e conomic base theory) disebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut, kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005: 28).

Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan PDRB per tahun menurut harga konstan, yang dinyatakan dalam satuan persen. Rumus pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ek}_{(\text{per tahun})} = \frac{\text{PDRB}_{(t)} - \text{PDRB}_{(t-1)}}{\text{PDRB}_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\text{PDRB}_{(t)}$ = PDRB tahun ke-t

$\text{PDRB}_{(t-1)}$ = PDRB tahun ke (t-1)

Penggunaan data pertumbuhan ekonomi dalam harga berlaku dengan alasan bahwa data dalam desentralisasi fiskal yang meliputi: pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun realisasi total pengeluaran pemerintah daerah adalah dalam harga berlaku (Mursinto, 2004).

2.1.3 Konsep Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang dirumuskan sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan konsep daerah otonom dalam Undang-undang dirumuskan sebagai berikut “Daerah otonom yang selanjutnya disebut sebagai daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU No. 32 Tahun 2004: 4).

Kewenangan otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah berwujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004: 4).

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah memiliki makna yang berbeda dengan otonomi daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974.

Secara teoritis dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga otonomi sendiri. Sendi-sendi tersebut adalah:

a. Sharing of Power (Pembagian Kewenangan)

Dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah UU No. 22 tahun 1999 menggunakan teori residu (teori sisa). Pemerintah pusat akan memegang tujuh kewenangan, kewenangan bidang politik, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama (Vide Pasal 7), konservasi, dan standarisasi Nasional.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan kota meliputi kewenangan wajib dan kewenangan bukan wajib. Kewenangan wajib terdiri dari sebelas kewenangan, yakni pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, penanaman, lingkungan hidup, pertamanan, koperasi, dan tenaga kerja.

b. Distribution of Income (Pemerataan Pendapatan)

Dalam pemerataan pendapatan ini, dilaksanakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999, yang mengenal empat model dalam pembagian pendapatan, yaitu:

1. 100 persen untuk pemerintah daerah dan 0 persen untuk pemerintah pusat. Ini berlaku untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan seluruh biaya yang berkaitan dengan tanah;
2. 80 persen untuk pusat dan 20 persen untuk daerah, ini berlaku untuk pertambangan minyak dan gas bumi;
3. 80 persen untuk pusat dan 20 persen untuk daerah, ini berlaku untuk pertambangan lainya selain petambangan minyak dan gas bumi;
4. 50 persen untuk pusat dan 50 persen untuk daerah. Ini berlaku untuk hasil perkebunan, pertanian, kehutanan, minyak dan gas bumi.

Dana ini nantinya akan diratakan secara seimbang kepada daerah dalam bentuk dana alokasi khusus.

c. Empowering (Pemberdayaan)

Dalam pelaksanaan otonomi yang luas, harus dilakukan pemberdayaan rakyat daerah. Pemberdayaan ini bertujuan untuk:

1. pengikatan kesejahteraan masyarakat daerah;
2. pengikatan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat daerah.

Sehubungan dengan rakyat daerah diwakili oleh DPRD, maka DPRD inilah yang diberdayakan pertama kali.

2.1.4 Keuangan Daerah

Keuangan daerah yang termuat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengandung pengertian semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam prinsip keuangan daerah terkandung unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok dalam keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai, serta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah.

Hak Daerah tersebut meliputi antara lain:

- a. Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000);
- b. Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 tahun 2000);
- c. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004);
- d. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 tahun 2004).

Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah pusat sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa dan
- d. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah serta secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber

daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sedangkan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran. Dari ketiga jenis pelimpahan wewenang tersebut, hanya pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi saja yang merupakan sumber keuangan daerah melalui alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak merupakan sumber penerimaan APBD dan diadministrasikan serta dipertanggungjawabkan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Para pengelola keuangan daerah tersebut adalah:

- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator PKD);
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- c. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PPA/PB);
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- f. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Anggaran daerah memiliki beberapa fungsi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

a. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

b. Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.6 Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur pembagian kewenangan di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang berimplikasi pada kebutuhan pembiayaan daerah yang lebih besar, membawa konsekuensi pada perlunya pembagian sumber-sumber keuangan.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penerimaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

Sumber penerimaan daerah tersebut adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang peranannya sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan komponen penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan paling menonjol perannya terhadap pelaksanaan desentralisasi. Keadaan demikian menggambarkan bahwa sampai saat ini kemampuan keuangan daerah masih sangat tergantung dari alokasi dari pusat (transfer).

Dana perimbangan terdiri dari:

1. dana bagi hasil (bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak);
2. dana alokasi umum (terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum);
3. dana alokasi khusus (dirinci menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah).

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain bersumber dari:

1. hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
2. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3. dana bagi hasil pajak dalam provinsi kepada kabupaten/kota;
4. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
5. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. PAD merupakan sumber pendapatan yang benar-benar diperoleh dan dipergunakan oleh daerah untuk membiayai peyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar PAD berarti bahwa kemampuan dalam melaksanakan pembangunan juga lebih baik, dan semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah maka bisa dikatakan daerah tersebut dikatakan mandiri.

Ibnu Syamsi (1984: 3) menjelaskan bahwa penerimaan daerah memang diharapkan dari PAD, sebagai penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD maka semakin tinggi kualitas otonominya. Kemudian jika ditinjau dari sudut kebijakan dalam penggunaan dana PAD merupakan pembiayaan yang

paling memberikan otonomi pada daerah. Sedang Devas (1988: 260) mengemukakan bahwa pemerintah daerah akan dapat meningkatkan tingkat otonomi yang diinginkan yaitu kebebasan bertindak jika mereka sendiri yang mencari sebagian besar uang yang mereka perlukan dan mereka membelanjakan sendiri.

Sumber penerimaan PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006):

a. Pajak Daerah

Pengertian pajak menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMD adalah badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang dapat

diadakan, diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah daerah berdasarkan asas ekonomi perusahaan dan ketentuan pokok perusahaan daerah ditetapkan dengan Undang-undang.

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan usaha Milik Negara (BUMN).
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam ketiga sumber PAD diatas adalah:

1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
6. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. pendapatan denda pajak;
9. pendapatan denda retribusi;
10. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. pendapatan dari pengembalian;

12. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan
14. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dinas-dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, pembentukan susunan organisasi dan formasi dinas daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Sumber penerimaan PAD sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai pungutan langsung yang digunakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah.

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran atau Penilaian PAD

Untuk meningkatkan kemandirian daerah maka pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus-menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya meningkatkan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran atau penilaian atas pungutan daerah.

b. Analisis Potensi PAD

Potensi PAD adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD.

Beberapa variabel yang perlu dianalisa untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD adalah:

a. Kondisi Awal suatu Daerah

Keadan struktur ekonomi dan sosial daerah sangatlah menentukan hal-hal berikut:

1. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitas tertentu.
 2. Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Peningkatan cakupan/eksistensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah (product) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha, di suatu daerah (region) tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu. Dengan demikian PDRB menunjukkan production originated dari suatu daerah tertentu.

2.1.8 Pengertian Kinerja

Menurut Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjelaskan pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi. Sedangkan menurut Indra Bastian (2001: 329), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

2.1.9 Pengukuran Kinerja

Larry D. Stout dalam Indra Bastian (2001: 329), mengemukakan pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Maksudnya adalah setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan pengertian pengukuran kinerja menurut Whittaker dalam Indra Bastian (2001: 330) menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja juga merupakan alat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk:

1. meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas;
2. menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran oleh manajemen atas program-programnya;
3. mengelola program secara efisien;
4. menyediakan data dalam pelaksanaan fungsi pengendalian program;
5. membuat kebijakan anggaran;
6. mengelola dan mengukur hasil program;
7. umpan balik bagi manajemen dalam rangka meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang dan

8. mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah dipercayakan kepada manajemen.

2.1.10 Indikator Kinerja

Indra Bastian (2001: 337) menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator kinerja. Elemen indikator kinerja terdiri dari lima elemen yaitu:

1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran yang besar. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi, untuk kegiatan yang bersifat penelitian, indikator kinerja berkaitan dengan keluaran paten dan publikasi ilmiah. Indikator keluaran, misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
3. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat

banyak. Indikator hasil, misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, produktivitas para karyawan atau pegawai.

4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu). Indikator manfaat, misalnya tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
5. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Dalam indikator ini, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Indikator dampak, misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain itu Dwi Yanto dalam Dewi Tari (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang biasanya digunakan untuk menilai kinerja organisasi pelayanan publik yaitu :

1. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik memanfaatkan faktor-faktor produksi.
2. Efektivitas terkait dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepatantasan.
4. Organisasi adalah pelayanan publik yang merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat.

2.1.11 Analisis Kinerja Keuangan pada APBD

Pengertian analisis keuangan menurut Abdul Halim (2007: 231) adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Hasil analisis ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu

pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak- pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/propinsi sebagai saran masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditor sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman atau pun membeli obligasi.

Menurut Abdul Halim (2007: 232) beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diuraikan berikut ini:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Paul Harrey dalam Abdul Halim (2001: 188) mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah antara lain:

- a. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 - 25	Intruktif
Rendah	26 - 50	Konsultatif
Sedang	51 - 75	Partisipasif
Tinggi	76 -100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2001: 188)

2. Rasio Efektivitas terhadap PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim, 2007: 234) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Potensi Riil Daerah Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Menurut Tagel Wirasa (2004: 30), sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

NO	Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
1.	Diatas 100	Sangat Efektif
2.	90 – 100	Efektif
3.	80 – 90	Cukup Efektif
4.	60 – 80	Kurang Efektif
5.	Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber: Tagel Wirasa (2004: 30)

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Abdul Halim, 2007: 234) kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatannya yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut

efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Rumusan untuk menghitung tingkat efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian kinerja efisiensi dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi

NO	Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
1.	100 – ke atas	Tidak Efisien
2.	90 – 100	Kurang Efisien
3.	80 – 90	Cukup Efisien
4.	60 – 80	Efisien
5.	Dibawah 60	Sangat Efisien

Sumber: Tagel Wirasa (2004: 30)

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal (Abdul Halim, 2007:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja aparatur daerah maupun belanja pelayanan publik terhadap belanja daerah yang ideal,

karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Rasio keserasian diformulasikan sebagai berikut:

a) Rasio Belanja Aparatur Daerah Terhadap APBD =

$$= \frac{\text{Total Belanja Aparatur Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

b) Rasio Belanja Pelayanan Publik Terhadap APBD =

$$= \frac{\text{Total Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

5. Rasio Pertumbuhan (Analisis Shift)

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (Abdul Halim, 2001: 272).

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:

r = Pertumbuhan (dalam persen)

P_n = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke - n

P_o = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal sebelumnya

6. Proporsi pendapatan dari belanja daerah (Analisis Share)

Analisis share terhadap pendapatan daerah bertujuan untuk mengetahui proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah, sehingga dapat pula diketahui besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Abdul Halim (2001: 347), proporsi pendapatan dan belanja daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Proporsi terhadap pendapatan daerah dapat dihitung dengan rumus

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan dalam APBD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

- b) Proporsi pengeluaran (belanja daerah) dapat dihitung dengan :

$$\text{Share} = \frac{\text{Pengeluaran dalam APBD}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.1.12 Desentralisasi Fiskal

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang- Undang No.33 tahun 2004 dibagi menjadi tiga yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan

banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Kusaini (2006: 29) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl 2000: 19). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah.

Bahl (2000: 25-26) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (there must be a champion for fiscal decentralization). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay, 1991):

a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut urgensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum (welfare state).
2. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi, kekuasaan yang didalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, perlu pemencaran kekuasaan (dispersed of power).
3. Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memalahi, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun

subsidi/bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Bahl (2000) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (taxing power). Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah ini secara teori dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak positif pajak (local tax rate) dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa tax revenue akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik.

Sebaliknya, dampak negatif pajak bagi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan karena pajak menimbulkan "deadweight loss of tax". Ketika pajak dikenakan pada barang, maka pajak akan mengurangi surplus konsumen dan produsen. Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/ pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang inarrsilus publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekekan ragam pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Tinjauan hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

1. Wijayanti (1997)

Dalam Penelitian Tingkat Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Tahun 1983–1992. Indeks kemampuan rutin yang merupakan ukuran tingkat kemandirian/otonomi suatu daerah, selama kurun waktu 10 tahun (tahun anggaran 1983/1984 – 1992/1993) di Kabupaten Daerah tingkat II Situbondo ternyata mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari angka fluktuasi indeks Kemampuan Rutin tersebut disimpulkan Bahwa PAD Kabupaten Dearah Tingkat II Situbondo belum dapat dikatakan mandiri. Berdasar analisis proporsi maka dapat diketahui bahwa faktor yang berperan memberikan sumbangan terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sumber retribusi daerah.

2. Tumilaar (1997)

Menganalisis derajat otonomi fiskal di Propinsi Sulawesi Utara dan menyimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah tingkat bantuan pemerintah pusat. Sementara tingkat ekonomi dan transfer menunjukkan pengaruh yang bervariasi pada masing-masing daerah. Tetapi yang terpenting adalah aspek ekonomi dan keuangan adalah yang paling besar pengaruhnya

untuk mengukur derajat otonomi fiskal. Penelitian memakai metode OLS dengan model koreksi kesalahan (Engle Granger ECM) dengan data runtut waktu tahun 1979-1993.

3. Negara (1998)

Melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, analisis perkembangan PADS, dan evaluasi derajat sentralisasi. Rumus yang dipakai : $(PADSt / PDt) * 100\%$, dimana PADSt = pendapatan asli daerah sendiri pada tahun t, PDt = penerimaan daerah pada tahun t. Kesimpulannya PADS Kabupaten Dati II Kudus relatif kecil (rata-rata 29,52%) terhadap total penerimaan daerah.

4. Yuliati (2001)

Dalam penelitiannya tentang kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah di Kabupaten Malang menyebutkan bahwa untuk mencapai kemandirian dengan mengandalkan PAD + bagi hasil, efeknya relatif lebih cepat daripada hanya mengandalkan PAD saja. Sementara penghitungan rasio PAD terhadap PDRB dengan menggunakan harga berlaku, menunjukkan hasil yang kurang baik. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu (1995/1996-1999/2000).

LP2I Semarang dengan pemerintah Propinsi Jawa Tengah (2000) tentang penggalan sumber-sumber pendapatan baru di Jawa Tengah, menyebutkan bahwa kondisi geografis, pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan PP nomor 25 tahun 2000, merupakan peluang utama dalam penelitian tersebut. Variabel lainnya adalah kondisi demografi, sosial budaya, serta kondisi pemerintahan

Kontribusi terbesar pada PAD adalah retribusi yang diikuti pajak, sumber lain, dinas, dan BUMD. Namun secara keseluruhan masih lebih baik daripada kondisi yang ada di 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menggunakan analisis SWOT dari hasil diskusi kelompok dengan beberapa instansi terkait serta para pakar di bidang keuangan publik yang dilanjutkan dengan analisis diskriptif.

5. Halim (2001)

Dalam penelitiannya tentang fiscal stress, disebutkan bahwa PAD masih berperan terhadap total penerimaan daerah/propinsi. Retribusi sebagai komponen utama PAD, berpengaruh secara signifikan daripada pajak. Sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak berpengaruh terhadap PAD. Analisis berdasarkan data realisasi anggaran propinsi sebelum fiscal stress (1996/1997) dan sesudahnya (1998/1999). Selanjutnya dilakukan pengujian dengan Paired Sample T Test, yaitu membandingkan dua sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda. Penelitian tersebut hanya terfokus pada angka rata-rata seluruh propinsi di Indonesia.

6. Engleni (2001)

Meneliti tentang PAD di Kota Padang menyimpulkan perlunya rencana penerimaan PAD jangka menengah yang memenuhi unsur rasionalitas dan berorientasi ke depan. Skenario ini merupakan langkah penting sebagai respon semangat kemandirian pendanaan daerah. Disamping sebagai pedoman penentuan langkah dan tindakan oleh dinas/unit kerja pengelola penerimaan PAD, juga sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas yang dikaitkan

dengan beberapa indikator pokok yaitu rata-rata pertumbuhan komponen PAD sebagai dasar untuk memprediksi rumusannya.

2.3 Kerangka Konseptual

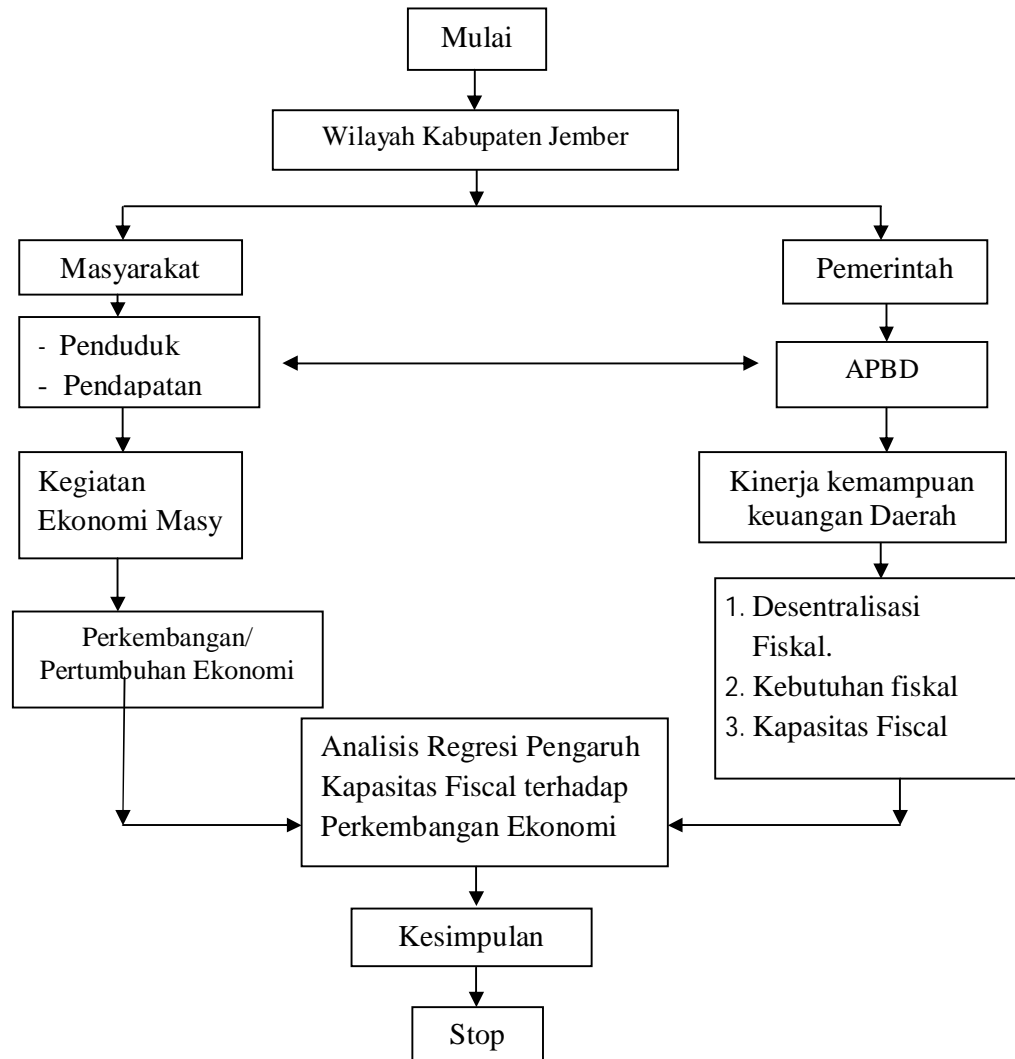
Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini adalah tentang analisis kinerja keuangan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Jember. Kajian ini akan mengisi kekosongan literatur yang ada dengan menambah jumlah kasus studi sehingga mencakup wilayah-wilayah lain yang berbeda karakternya. Dalam studi ini, digunakan pendekatan analisis deskriptif komparatif dengan memecahkan masalah yang terjadi saat ini.

Sebagaimana yang tersebut dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006, bahwa untuk penyelenggaraan ekonomi daerah diperlukan wewenang dan kemampuan pemerintah menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah dari penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam penerapannya, daerah diharuskan mampu mengelola pendapatan daerahnya untuk membiayai berbagai pengeluaran dengan maksud untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi cermin bagi kemampuan keuangan daerah yang terwujud dalam kinerja keuangan daerah. Permasalahan yang muncul adalah apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut mampu mencukupi pengeluaran daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan ekonomi. Ditengah tingginya pengeluaran yang dilakukan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat sedikit, pemerintah daerah masih

menggantungkan penerimaan dari pemerintah pusat sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah yang mandiri secara finansial masih jauh dari impian.

Kerangka konseptual secara umum dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- a. Kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai pengeluaran rutin kabupaten Jember semakin meningkat.
- b. Perkembangan ekonomi dilihat dari indicator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember semakin meningkat.
- c. Kapasitas fiskal berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Jember.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rencana Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dengan pendekatan analisis diskriptif komparatif-kuantitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang terjadi saat ini melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni yang memiliki faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya (Surakhmad, 1990: 139). Penelitian ini juga bertujuan menghasilkan suatu generalisasi dari realita yang berkembang melalui suatu metode pemikiran (Sumanto, 1995: 12).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dinamika Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Jember sejak dilaksanakannya otonomi daerah yaitu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2011.

3.1.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan sampel yang digunakan adalah sejak dilaksanakannya otonomi daerah yaitu tahun 2001-2011. Tahun tersebut diambil dengan

pertimbangan bahwa otonomi daerah sudah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Jember.

3.1.4 Daerah Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jember dengan pertimbangan Kabupaten Jember memiliki struktur perekonomian hampir sama dengan struktur perekonomian di kebanyakan Kabupaten-kabupaten di Indonesia yaitu struktur ekonomi agraris. Disamping itu sebagai pusat pengembangan wilayah Jawa Timur bagian timur, dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dibuat dan hipotesis yang diajukan, maka jenis penelitian ini disebut penelitian eksplanasi. Menurut Faisal (1992) penelitian ekplanasi (explanasy research) adalah untuk menguji hipotesis antara variabel yang dihipotesakan.

Sedang menurut Singarabun dan Efendy (1993) explantoru research adalah penelitian yang melihat hubungan antara variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, oleh karena itu dinamakan juga penelitian hipotesis.

Dari penjabaran tersebut dapat diambil pengertian bahwa penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tentang penerimaan dan pengeluaran daerah pada tahun 2001-2011. Data tersebut diperoleh dari berbagai instansi yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember seperti Bappeda Kabupaten Jember, Kantor BPS, Kantor Kas, Perbendaharaan Negara (KPKN) dan Kantor Pelayanan PBB.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan data di BPS Kabupaten Jember pada tahun pengamatan 2001-2011.

3.3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa di ukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan Reksohadiprojo (2000) dalam bukunya “Ekonomi Publik” ada beberapa Analisis kinerja kemampuan keuangan daerah diantaranya: desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, dan kapasitas fiskal.

Adapun parameter yang digunakan yaitu:

a. Desentralisasi Fiskal

Kemandirian daerah disini dimaksud adalah kemampuan pendapatan daerah seperti PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dalam membiayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Menurut Halim, (2001) parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah derajat kemandirian daerah, yaitu

parameter untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah sebagai berikut, Halim (2001):

1. Rasio Kemandirian Daerah = $\frac{PAD}{TPD} \times 100$
2. BHPBP / TPD X 100
3. Sum/ TPD X 100

Dimana:

PAD = Pendapatan asli daerah

BHPBP = Bagi hasil pajak dan bukan pajak

Sum = Sumbangan Pemerintah pusat.

TPD = Total Penerimaan Daerah

$TPD = PAD + BHPBP + SUM$

Sum = DAU + DAK + Pinjaman daerah + Lain-lain penerimaan yang sah

Semakin tinggi hasilnya, maka desentralisasi fiskal semakin tinggi pula. Artinya Apabila jumlah PAD lebih besar dari bantuan dari pusat maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil.

Semakin tinggi hasilnya, maka desentralisasi fiskal semakin tinggi pula.

b. Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal adalah untuk mengukur kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Semakin tinggi indeks, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar.

Pengukuran dengan menghitung rata-rata Standart Kebutuhan Fiskal (SKF) sepropinsi.dengan formula:

$$S K F = \frac{PDRB/Jml\ Penduduk}{Jumlah\ Kecamatan}$$

Kemudian menghitung Indeks Pelayanan Publik per kapita (IPP) masing masing pemerintah kota : dengan formula sebagai berikut:

$$IPP = SKF/PPP$$

Dimana:

PPP = Pengeluaran Aktual perkapita untuk jasa publik (jumlah pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin)

IPP = Indeks pelayanan publik perkapita

SKF = Standar Kebutuhan Fiskal

Semakin tinggi hasilnya IPP, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar.

c. Kapasitas Fiskal (Fiskal capacity)

Kapasitas Fiskal adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (SDA), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Penghasilan (PPh) perseorangan

Mengenai kapasitas fiskal ini, satu dampak yang perlu diingat dengan penggunaan pendapatan aktual daerah sebagai ukuran kapasitas fiskal akan berdampak kurang baik, karena akan menyebabkan transfer dari

pusat ke daerah banyak dipengaruhi oleh upaya perpajakan (tax effort) daerah. Hal ini akan menimbulkan opini negatif bahwa daerah tidak perlu bersusah payah menghimpun pendapatan (under-collect), agar bisa memperoleh transfer yang banyak dari pusat, dimaksud dengan kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi dengan belanja pegawai serta dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Dalam Penghitungan kapasitas fiskal menggunakan formula:

$$KF = \frac{(PAD + BH + DAU + LP) - BP}{\text{Jumlah penduduk miskin}}$$

Dimana:

KF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BH = Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

DAU = Dana Alokasi Umum

LP = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah kecuali Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu

BP = Belanja Pegawai

3.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan PDRB per tahun menurut harga konstan, yang dinyatakan dalam satuan persen. Rumus pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}(t) - \text{PDRB}(t-1)}{\text{PDRB}(t-1)} \times 100\%$$

3.3.3 Analisis Regresi

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu cara analisa langsung dari hasil reviews dan tabel dengan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam tabel seperti rata-rata, persentase dan ukuran statistik lainnya. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), lain-lain pendapatan yang sah, belanja pegawai serta jumlah penduduk miskin terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Jawa Timur adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah

kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali, 2005). Maka model penelitian ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = f (X_1, X_2, \text{ dan } X_3)$$

Secara pengertian ekonomi, penjelasan fungsi matematis diatas adalah bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember Jawa Timur (Y) akan dipengaruhi oleh Kapasitas Fiscal (X_1).

Model dari variable-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (Gujarati, 2003)

$$Y = a + b_1 X_1 + e$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember Jawa Timur yang dihitung dalam nilai persentase.

a = nilai Y pada saat besarnya dipengaruhi oleh Kapasitas Fiscal Kabupaten Jember Jawa Timur (X_1), adalah konstan.

b_1 = Koefisien pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), lain-lain pendapatan yang sah, belanja pegawai serta jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember Jawa Timur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Jawa Timur.

X_1 = Kapasitas Fiskal Kabupaten Jember Jawa Timur, yang dihitung dalam rasio

e = variabel pengganggu

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: Kapasitas Fiskal Kabupaten Jember (X_1), terhadap variabel terikat yaitu Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember.

1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel bebas. Jika terjadi multikolinearitas sempurna maka penaksir OLS menjadi tidak tertentu dan varians atau kesalahan standarnya juga menjadi tidak tertentu (Gujarati dalam Sumarmo Zain, 1997: 162). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai R^2 yang dihasilkan dari suatu estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variable-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- 2) Nilai korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi (biasanya diatas 0,90).
- 3) Nilai Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF) melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0,9 maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi penyebaran yang tidak sama atau tidak samanya varian sehingga uji signifikansi tidak valid. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan

lain. Jika terjadi heteroskedastisitas maka penaksiran OLS tetap bias dan konsisten tetapi penaksiran tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak mengandung heteroskedastisitas. Lebih jauh lagi untuk menguji model regresi yang digunakan terdapat heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Park. (Gujarati, 2003: 403-414).

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain, dengan kata lain adalah variabel gangguan yang tidak random. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deretan waktu atau time series) atau ruang (seperti dalam data cross section atau lintas sektoral) (Gujarati, 2003: 442).

Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model penggunaan lag pada model, tidak memasukkan variabel yang penting. Akibat adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya tidak minimum, sehingga tidak efisien. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada model regresi dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson.

2. Pengujian Hipotesis

Setelah dinyatakan bebas dari penyimpangan asumsi klasik selanjutnya adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah semua variabel independennya memang secara bersama-sama mempunyai pengaruh nyata

terhadap variabel dependennya. Uji statistik adalah menguji apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan metode statistik yang ada, meliputi:

a. Uji Simultan (Uji F)

Yaitu untuk menguji tingkat signifikansi secara bersama-sama parameter dari variabel yang diukur (independen) terhadap variabel dependen, apakah dapat diterima secara statistik dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Kaidah keputusan uji F statistik sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesa diterima
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesa ditolak. Artinya bahwa secara bersama-sama variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen atau terdapat hubungan yang signifikan.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk menghitung kontribusi Variabel bebas dengan variabel terikat maka digunakan koefisien korelasi sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{1 \quad Y_i X_{1i} + 2 \quad Y_i X_{2i} + \dots + k \quad Y_i X_{ki}}{Y_i^2}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi

ESS = Jumlah Kwadrat yang dijelaskan

TSS = Jumlah Kwadrat Residual

Digunakan untuk melihat besarnya pengaruh dari variable-variabel independent terhadap variabel dependen. Kaidah keputusan R^2 adalah

- Jika R^2 mendekati 0, maka diantara variabel independent dan variabel dependen tidak ada keterkaitan.

- Jika R^2 mendekati 1, maka di antara variabel independent dan variabel dependen ada keterkaitan.

3.4 Definisi Variabel Operasional

Definisi variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD); tingkat kemandirian daerah; Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- b. Tingkat kemandirian daerah adalah tingkat kemampuan yang berasal dari potensi ekonomi daerah atau pendapatan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran rutin daerah.
- c. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) adalah angka yang menunjukkan besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluarannya melalui Pendapatan Asli Daerahnya.
- d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah (product) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha, yang melakukan usahanya di suatu daerah tertentu.
- e. Y adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember Jawa Timur.
- f. X adalah kapasitas fiskal dalam rasio, adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikurangi dengan belanja pegawai serta dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan analisis, studi ini ingin mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian fiskal kabupaten Jember. Berdasarkan analisis pada Bab 4, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya sumbangan pemerintah pusat kepada Kabupaten Jember. Sehingga dapat dikatakan Kabupaten Jember masih belum mandiri. Selama otonomi daerah tahun 2001-2011 rasio kemandirian Kabupaten Jember masih sangat rendah berkisar antara 5,16% - 10,95% atau kurang dari 25% artinya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.
2. Kapasitas fiskal Kabupaten Jember Jawa Timur sangat baik akan tetapi kemampuan dalam memenuhi atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang digali secara penuh oleh Kabupaten Jember Jawa Timur. Hal ini terlihat dari kapasitas fiskal yang semakin meningkat namun sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan sangat rendah. Kapasitas fiskal dari tahun 2001-2011 terus meningkat yaitu dari Rp120.250,92 menjadi Rp802.752,23 sedangkan kenyataan PAD yang mampu disumbangkan terhadap TPD hanya sebesar 10%.
3. Kapasitas fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan kapasitas fiskal yang baik. Dari analisis Koefisien Determinasi, R Square 0,649 atau 64,90% yang berarti bahwa pengaruh kapasitas fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi cukup tinggi yaitu sebesar 64,90% sedangkan 35,10% dipengaruhi oleh faktor lain.

5.2 Implikasi Kebijakan

Berangkat dari hasil kesimpulan diatas, maka timbul pemikiran kedepan yang tertuang dalam implikasi kebijakan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember perlu menggali potensi ekonomi lokal seperti pengembangan pariwisata dan pengembangan pusat agrobisnis.
2. Pos anggaran harus efektif dan efisien sehingga dapat menyentuh sasaran kebijakan guna peningkatan pendapatan asli daerah
3. Meningkatkan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Jember serta menjaga persaingan usaha antar badan usaha guna terciptanya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dinamis.
4. Pemerintah daerah agar berusaha untuk mendapatkan bagi hasil dari pusat terkait sumberdaya daerah yang peenerimaannya disetor seluruhnya ke pusat, sebagai contoh bagi hasil cukai yang semuanya merupakan penerimaan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007. Akutansi Sektor Publik. Akutansi Keuangan Daerah, Salemba Empat Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1999, Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE)
- Bahl, Roy W. ,2000. China Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom : Cambridge Univercity Press. 2002, "Implementation Rules For Fiscal Decentralization", Working Paper, Georgia State University.
- Banalay, 1991, Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumu Aksara
- Blakely, Edward J. 1988.Planning Local Economic Development Theory and Practice.Newbury, California: Sage Publication, Inc.
-Depdagri. 1974. Undang-undang Nomor 5 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Percetakan RI.
-Depdagri. 1993. Tap MPR RI No.II/MPR/1988 tentang GBHN. Jakarta: Percetakan RI.
-Depdagri. 1999. Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Percetakan RI.
-Depdagri. 1999. Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antar PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Percetakan RI.
-Depdagri. 2004. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Percetakan RI.
-Depdagri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. Jakarta: Percetakan RI.
- Jember dalam Angka, BPS Kabupaten Jember, 2000 sampai 2012.
- Devas, 1988Kesadaran Budaya Tentang Tata Ruang Di Daerah Kalimantan Selantan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dewi Tari, 2006.Kausalitas Antara Uang Beredar dan Inflasi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. No. 2. ha13-14.
- Faisal, 1992,Pengaruh Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

- Gujarati, D.N. 1995. Basic Econometrics.3 Edition.MacGraw-Hill International Edition.
- Irawan, dan Suparmoko. 1987. Ekonomi Pembangunan. Yogya : Liberty.
- Iwan, 1994, Aziz,. Ilmu Ekonomi Regional dan beberapa Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: LP FEUt.
- Indra Bastian (2000). Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Jakarta: Perhepi.
- Jhingan , ML. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaho, J.R, 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kay, Ulli Rahmi. 2003. Uji - Kausalitas Hubungan Antara Harga Beras-'Dan Tingkat Inflasi Di Sumatera Selatan (Penerapan Uji Kausalitas Granger). Jurnal EP UNSRI. Palembang.
- Kuncoro, Mudrajad 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga
- Machmud, Sofyan. 2003. Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan. Thesis. PPS Universitas Sriwijaya Palembang. McEachem,
- Maknun, Mappaujung. 1995. Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. PS. Studi Pembangunan :Thesis. Universitas Gadjah Mada. Tidak dipublikasikan.
- Marwa, Taufiq. 2001. Respon Pelaku Pasar Komoditi Beras Terhadap Perubahan Variabel Harga dan Bukan Harga di Propinsi Sumatera Selatan. Disertasi. PPS UTv'PAD Bandung
- Mursinto, Djoko, 2005, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, Disertasi, tidak dipublikasikan. Surabaya : Pascasarjana Unair.
- Prasmanm 2000. : Statistika. Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Nusantara
- Negara, 1996.Pengembangan Konsep Pusat Pertumbuhan Terhadap Wilayah Kepulauan Indonesia. Jakarta. Media Ekonomi Trisakti
- Ramanathan, Ranu. 1992. Deficit Finance and Economic Growth. Thesis Master, Department of Accounting and Finance. University of Birmingham.Unpublished.

- Reksohadiprodjo dan Karseno. 1993. *Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Reksohadiprodjo dan Pradono. 1998. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*. Yogyakarta: BPFE.
- Sading, Yunus. 1999. *Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Perekonomian Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah*. Thesis. *Ekonomi dan Studi Pembangunan*. IJNPAD Bandung.
- Sumanto, 1995, *Kausalitas Antara Ekspor dan PDB di Indonesia, 1971-1997*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Vol. XLVII No. 3. Suharto. *Apakah terdapat Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Investasi Asing Langsung?* *Jurnal Ekonoami Univ. Krisna Dwipayana*.
- Sumarno Zain, 1997 *Operasional Penataan Ruang dan Trilogi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Surahmad, 1990, . *Materi Pokok Ekonomi Regional*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Simanjuntak, Payaman, 1999, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, Edisi 2001, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
- Siregar, Masdjidin. 1999. *Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur*, Disertasi, tidak dipublikasikan. Surabaya Pascasarjana Unair.
- Spillane dan Wan. 1993. Sujarto. 1986. *Pemekaran Kota atau Dekonsentrasi Planalogis. Tinjauan Mengenai Hubungan Pemukiman Desa – Kota*. Jakarta: LP3ES.
- Sukirno, Sadono. 1948. *Pengantar Teori Mivakroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Rakyat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Suntowo, Bambang. 2006. *Analisis Penggunaan Terbaik dan Tertinggi dan TOWS terhadap Tanah Kosong (studi kasus di jalan raya Jombang-Mojokerto Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: UGM.
- Supranto. 1995. *Ekonometrik*. Yogyakarta: BPFE.
- Suryana dan Pasandaran. 1993. *Peranan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. Jakarta: LP3ES.
- Tarigan, 2005, *Modern Econometric: An Introduction*. London: AddisonFJesley Longman.

- Tagel Wirasa, 2004, "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Daerah : Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan", Indonesian journal of Economics and Development, Vol.4 No.1 Juli 2003. Hal. 17-37. Jakarta : FE UI
- Todaro, 2003,, Economics Development in The Third World, Fourth Edition, New York: Longman Group Ltd.
- Tumilar, 1997Studi Evaluasi Perubahan Penggunaan Lahan di Setiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Laporan Penelitian. Jember: Lemlit UNEJ.
- Oates, 1993.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan. Ekonomi Kabupaten h:usi Banyuwasin. Thesis.PPS Universitas Sriwijaya Palembang.
- Wagito. 1992. Wardhany, Rosalina. 2003. Wijayanti, Kencana Sari. 1996. Tingkat Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo 1983-1992. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Jember: FE-UNEJ.
- Yulianti, 2001Analisis Konversi Lahan dari Sektor Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Lamongan.Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Jember: FE-UNEJ.
- Yunus, Hadi S. 2000. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.